

**STUDY KOMPARATIF PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA  
LAZIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA DAN  
*BAITUL MAAL GOZIS DI SLEMAN***



**NASKAH PUBLIKASI ILMIAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Syari'ah (S.Sy) Program Studi Muamalat (Syari'ah)**

**Umi Khoirunnisa'**

**I 000 080 010**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

## **SURAT PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/ tugas akhir:

Nama : M. Muhtarom, S.H, M.H

NIK : 381

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Umi Khoirunnisa'

NIM : I 000 080 010

Fakultas/ Progdil : FAI/ Muamalat (Syari'ah)

Judul Skripsi : **STUDY KOMPARATIF PENERAPAN  
AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURAKARTA DAN BAITUL MAAL GOZIS DI  
SLEMAN**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian surat pengesahan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 13 Juli 2013

Pembimbing,



**M. Muhtarom, S.H, M.H**

**381**

## **SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

***Bismillahirrahmanirrohim***

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Umi Khoirunnisa'  
NIM/NIK/NIP : I 000 080 010  
Fakultas : AGAMA ISLAM  
Jenis : SKRIPSI  
Judul : STUDY KOMPARATIF PENERAPAN  
AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURAKARTA DAN *BAITUL MAAL* GOZIS DI  
SLEMAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, Juli 2013

Yang Menyatakan



Umi Khoirunnisa'

**Study Komparatif Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat  
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Baitul Maal Gozis di Sleman.**

Oleh : Umi Khoirunnisa' (NIM : I 000 080 010)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

**ABSTRAK**

Kemunculan lembaga keuangan islam khususnya lembaga pengelolaan zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar, para pakar syari'ah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti yang telah dikenal selama ini.

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunaannya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang study komparatif penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat dan shadaqah Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Baitul Maal Gozis di Sleman dan bertujuan untuk menjelaskan, membandingkan aplikasi yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang bersifat ilmiah dan objektif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah informan, Pengelola LAZIS UMS dan Baitul Maal Gozis di Sleman ditambah dengan buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan metode dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dalam Penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian zakat pada LAZIS UMS dan Baitul Maal Gozis memiliki kesamaan dan perbedaan dalam sistem penerapan akuntansi yang digunakan, serta masih bersifat standar namun dalam perhitungan transaksi zakat sudah menggunakan rumus perhitungan yang sesuai dengan syariat Islam.

( kata kunci : Zakat, Akuntansi, LAZIS UMS, GOZIS di Sleman )

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban setiap individu yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang diatur berdasarkan ketentuan syara'. Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat dari masyarakat (ummat) dan, (2) melakukan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah telah

mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan', *ath-thaharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan'.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Alloh untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalannya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

Kedudukan dan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat

berdimensi vertical-ketuhanan. Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : *pertama*, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan. Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa*

*Tamwil (BMT)*, Cet 2 (Yogyakarta : UII Press), hlm. 189-190.

Dalam Q.S Al-Baqoroh: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ  
[٢:٤٣]

“ Dan dirikanlah sholat,  
tunaikan zakat dan ruku' lah  
beserta orang-orang yang ruku”

Q.S Al-Kahfi: 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا  
لَأُنْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ  
عَمَلًا

“Sesungguhnya mereka yang  
beriman dan beramal shaleh,  
tentulah kami tidak akan menyia-  
nyiakan pahala orang yang  
mengerjakan amalannya dengan  
baik (ihsan)”

Dalam surat diatas dapat  
diambil hikmahnya yaitu kewajiban

seorang muslim untuk membayar  
zakat berimplikasi harus adanya  
perhitungan yang tepat. Dan Alloh  
SWT memberikan pahala kepada  
orang orang yang beramal secara  
*ihsan itqon* (baik dan professional).

Kedudukan lembaga zakat  
dalam lingkungan yang semakin  
maju dan kompleks sangat penting,  
karena kelemahan yang dijumpai  
selama ini adalah tidak adanya  
manajemen zakat yang baik. Dengan  
semakin majunya ummat baik dari  
segi ekonomi, ilmu pengetahuan  
maupun keyakinan beragama, maka  
jumlah Muzakki (pembayar zakat)  
akan bertambah dan juga kuantitas  
zakat akan meningkat. Untuk  
mengantisipasi keadaan tersebut  
perlu dibuat lembaga-lembaga zakat  
yang dikelola dengan manajemen  
yang maju.

Manajemen zakat pada  
dasarnya bukan masalah yang  
sederhana. Manajemen zakat  
membutuhkan dukungan politik  
(*political will*) dari umara  
(pemerintah). Selain itu manajemen  
zakat juga membutuhkan dukungan  
sistem informasi akuntansi dan  
sistem informasi manajemen yang

baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini merupakan langkah yang lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, wajib pajak yang sudah membayar zakat kepada lembaga atau badan amil zakat yang disahkan pemerintah, maka pembayaran zakat tersebut dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajaknnya (PKP). Muzakki (pembayar zakat) apabila memiliki surat bukti (dokumen) pembayaran zakat dapat menggunakan dokumen tersebut untuk keperluan pengurangan PKP-ya. Untuk itu diperlukan sistem pencatatan yang baik dari lembaga-lembaga zakat yang ada.

Potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan memperoleh angka sebesar Rp. 6,5 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah,

wakaf. Namun pada kenyataannya saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 150 miliar per tahun. Ternyata salah satu penyebabnya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.

Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Cuma masalahnya sekarang adalah sampai saat ini standar akuntansi zakat yang sah belum ada di Indonesia. Oleh karena itu penilaian terhadap modal untuk menghitung zakat harus dilakukan berdasarkan *Current Cost Accounting*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk di dalamnya pencatatan



(fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksannya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun BAZ (Badan Amil Zakat).

## LANDASAN TEORI

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antar lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi anggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk mengambil keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program

yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sodaqoh, hibah dan wakaf yang diterima.

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi zakat dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilai kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun non finansial. Sebagai contoh indikator kinerja tersebut adalah :

### Indikator efisiensi

- a. Persentase dana yang didistribusikan dibandingkan dengan total dana yang diterima.
- b. Persentase jumlah masyarakat miskin yang terbantu (terlayani) oleh pengelola zakat dibandingkan dengan total

jumlah masyarakat miskin di wilayah itu.

Indikator efektifitas

- a. Persentase jumlah masyarakat miskin yang terentaskan dibandingkan dengan total jumlah penduduk miskin di wilayah itu sebagai dampak dari penyaluran zakat.
- b. Persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan total penduduk di wilayah itu

Indikator penjas lainnya

Persentase kenaikan/penurunan jumlah zakat (muzakki)

- a. Persentase kenaikan/penurunan jumlah dana zakat, infak dan shodaqoh yang terkumpul.
- b. Persentase jumlah dana zakat, infak dan shodaqoh yang terhimpun dibandingkan dengan potensi.
- c. Banyaknya produk jasa dan program yang dilakukan.
- d. Ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi zakat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan

sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah).

## Kajian Pustaka

### METODE PENELITIAN

Sebelum penelitian ini dilakukan memang sudah pernah ada penelitian penelitian yang sejenis. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang dapat penulis kemukaan sebagai kajian pustaka.

1. Jurnal pengembangan system akuntansi zakat dengan *Teknik Fund Accounting* oleh Pusat penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE.UIL, Yogyakarta, 25 Februari 2003: pengelolaan zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat-zakat dapat memiliki fungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang diperhitungkan dalam analisis ekonomi, pengelolaan zakat yang profesional memerlukan

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama, ketrampilan teknis yang memadai serta memiliki visi dalam pengembangan umat. Kelemahan selama ini adalah manajemen yang buruk dalam pengelolaan zakat. Di samping itu dukungan politik (*Political will*) dari pemerintah yang dipertegas dalam adanya peraturan perundang-undangan zakat merupakan kunci berkembangnya zakat.

2. Dr. Setiawan Budi Utomo, Ketua Tim Akuntan Zakat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akuntansi zakat sebuah keharusan. Dalam perjalanan pembahasan akuntansi zakat banyak persoalan yang menjadi fokus perdebatan di kalangan anggota tim kerja, yang memerlukan diskusi lebih lanjut diantaranya, zakat atas perkumpulan harta (entitas), cara perhitungan zakat untuk wajib zakat entitas (perusahaan). Dari perspektif akuntansi, zakat yang dihitung

berdasarkan dua pendekatan itu mempunyai beberapa aspek yang harus dipertimbangkan yakni berdasarkan aset neto. Di sini akan menimbulkan kesulitan dalam menghitung aset neto, dengan semakin banyaknya *intangible asset* yang tidak tercatat di dalam neraca. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang *computer software*, zakat yang dikenakan akan lebih kecil dibandingkan perusahaan tekstil, walaupun kemungkinan besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan *computer software* akan lebih besar daripada perusahaan tekstil dan berdasarkan keuntungan neto; dinilai lebih cocok, karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang besar akan dikenakan zakat yang lebih besar, tanpa memperhatikan besaran aset neto yang dimiliki perusahaan tersebut.

#### **A. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang

tersusun secara sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh benar keabsahannya sehingga penelitian ini layak untuk diuji kebenarannya.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang diperlukan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu (Subagyo, 2004:94).

#### 2. Subyek penelitian,

*Tatang (1986;93)* memberikan pengertian bahwa subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh informasi, yang dapat diperoleh dan seseorang maupun suatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah pengelola lembaga zakat,

kesekretariatan lembaga zakat dan pengelola *Baitul Maal Tanwil* Gozis.

#### 3. Data yang dibutuhkan

Sejarah Lembaga Amil Zakat dan Baitul Maal

- a. Struktur organisasi lembaga amil dan deskripsi jabatan
- b. Perkembangan lembaga/organisasi sejenisnya
- c. Sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat pada kedua lembaga tersebut.
- d. Laporan keuangan organisasi dan perlakuan akuntasinya
- e. Berbagai pendapat para ahli / akademisi dan praktisi atas akuntansi dana zakat yang dikelola Lembaga.

#### 4. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara (*Interview*)

*Sutrisno Hadi (1983;20)*

menyatakan bahwa metode interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis. Teknik

wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya pewawancara garis besar hal-hal yang ditanyakan (Suharsini, 1998:27).

Metode *wawancara* dalam penelitian ini dipakai peneliti untuk mengambil data tentang pengelolaan akuntansi zakat di dua lembaga amil zakat LAZIZMU UMS dan *Baitul Maal* GOZIS di Sleman. Dalam riset ini, penulis akan mencoba mendapatkan data-data, informasi yang terkait dengan permasalahan penerapan akuntansi zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Selain itu sebagai pembandingan dan bahan referensi, penulis juga melakukan studi perpustakaan guna mendapatkan, mempelajari, dan menelaah literature- literatur, artikel-artikel, internet dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### b. Dokumentasi

Metode *dokumentasi* adalah mencari data mengenai hal hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan

sebagainnya (Suharsini, 1998:149). Sumber dokumentasi dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari LAZIS UMS dan GOZIS Sleman. Mengenai Letak Geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi LAZISMU UMS dan *Baitul Maal Tamwil* GOSIZ Sleman dan penerapan akuntansi zakat di kedua lembaga zakat tersebut.

#### B. Metode Analisa Data

Setelah memperoleh semua data, selanjutnya peneliti mengumpulkan temuan-temuan tersebut, sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh sesuai dengan arah penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif dan komparatif antara kedua objek penelitian, yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep atau teori yang kemudian. Selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran data tersebut apakah diterima atau ditolak.

Dalam arti penguraian masalah yaitu penerapan laporan keuangan penghimpunan, pendistribusian dan pengelolaan zakat dan sistem

akuntansi dari LAZIS MU UMS dan *Baitul Maal Tamwil* GOZIS yang meliputi analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporannya. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini belum terdapat standar akuntansi untuk lembaga amil zakat yang dikelola secara mandiri.

### **HASIL PENELITIAN**

Perbedaan yang ada di kedua lembaga ini juga terlihat pada proses akuntansi yang dilakukan, khususnya dalam hal perlakuan akuntansi keuangannya. Tujuan utama akuntansi keuangan lembaga amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi pada pihak yang berkepentingan. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan. Akuntan publik, sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan performance lembaga zakat. Namun yang paling

berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan LAZ adalah masyarakat itu sendiri, khususnya para *muzakki*, karena mereka berhubungan langsung dengan amil zakat (Muhammad Ridwan, 2004).

Sesuai dengan tugas pokok dari Lembaga Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat itu sendiri dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya kepada para muzakki yang telah mempercayakan Lembaga Amil dalam mengelola zakat yang disalurkan.

Proses pencatatan siklus akuntansi pada LAZIS MU UMS dimulai pada saat penarikan dana zakat oleh asnaf. Pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian khusus atau jurnal, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan golongan asnaf dalam Laporan kas harian, dan diringkas

lagi dalam laporan penyerahan dana zakat dan direkap dalam rekapitulasi penyaluran dan penerimaan dana zakat. Berdasarkan laporan rekapitulasi ini, baru dibuat laporan keuangan GOZIS secara keseluruhan. Siklus ini dinilai terlalu rumit dan panjang, sebaiknya GOZIS menggunakan dokumen-dokumen seperti yang telah diterapkan dalam manajemen LAZIS UMS. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa Bukti Penerimaan, Bukti Pengeluaran, dan bukti-bukti lainnya sehingga memudahkan dalam penggolongan dana dan aktivitasnya.

GOZIS setiap bulannya membuat laporan komprehensif yang berisikan informasi keuangan lembaga secara keseluruhan, dan pada akhir tahun dibuat laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang dikelola selama periode satu tahun penuh. Lain halnya dengan LAZIS UMS, lembaga amil ini membuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana yang dikelola oleh lembaga ini ditambah dengan adanya laporan konsolidasi yang merupakan gabungan dari laporan masing-masing dana.

Manajemen LAZ secara berkala harus menerbitkan laporan keuangannya. Laporan ini menjadi sangat strategis dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon *muzakki*. Keyakinan mereka terhadap LAZ dapat dibangun melalui laporan keuangan yang benar. Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Akuntansi LAZIS UMS dan Baitul Maal GOZIS di Sleman :

Terdapat perbedaan pengelolaan dana pada kedua lembaga amil ini, dimana BMT GOZIS hanya mengelola dana yang berasal dari 2 pos penerimaan, yaitu dari Zakat Internal, Infaq dan Shodaqoh dan Zakat dana bergulir.,

sehingga proses pendistribusian zakat seringkali hanya terbatas pada kebutuhan konsumtif saja. Sedangkan LAZIS UMS memiliki 4 pos penerimaan yang berasal dari dana Zakat Internal dan Eksternal, dana Infaq dan Shodaqoh, Dana Operasional, dan Dana Jasa Giro.

Dana yang disalurkan tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga dana produktif sekaligus pembinaan dari LAZIS UMS sehingga memacu mustahiq untuk mau berusaha mengembangkan usahanya.

Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh BMT GOZIS SLEMAN dan LAZIS UMS dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*Cash basis*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran dana zakat yang dikumpulkan oleh BMT GOZIS dan LAZIS UMS didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur mengenai perhitungan *nishab* zakat, menggunakan perhitungan zakat profesi yang berupa uang atau gaji sebesar 2,5 % dari gaji kotor karyawannya.

Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amal sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. Dan untuk Penyajian laporan keuangannya antara BMT GOZIS SLEMAN dengan LAZIS UMS tidak jauh berbeda, dimana laporan keuangannya terdiri dari: Neraca, Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana, Laporan Dana Termanfaatkan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun BMT GOZIS SLEMAN tidak membuat Laporan Dana Termanfaatkan secara terperinci.

Bentuk pertanggung jawaban keuangan lembaga amal belum bisa diseragamkan karena sampai saat ini belum ada suatu standar akuntansi untuk lembaga amal zakat yang dikelola oleh lembaga mandiri. Proses pencatatan transaksi yang dilakukan masih dilakukan secara manual, ini disebabkan belum adanya software yang cocok dengan Akuntansi zakat



Laporan keuangan tahunan BMT GOZIS SLEMAN belum diaudit oleh auditor independent setiap tahunnya, sehingga sejauh ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan akuntan publik, laporan keuangan yang dibuat oleh BMT GOZIS, belum disajikan secara wajar dan belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan LAZIS UMS sampai saat ini belum melakukan audit oleh auditor independent. Selama ini audit masih dilakukan oleh Divisi II yang mengatur masalah administrasi keuangan.

Kelemahan BMT GOZIS terletak pada struktur organisasinya dimana masih terdapat penggandaan fungsi organisasi selain itu lembaga ini belum memiliki divisi penyaluran yang berfungsi untuk memastikan apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Pendistribusian dana masih bersifat konsumtif, siklus akuntansi yang terlalu rumit dan panjang dan sampai saat ini masih menerima penerimaan berupa bunga

(*Riba'*) dari bank yang sangat bertentangan dengan prinsip Syariah.

Kelebihannya adalah sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansinya, laporan keuangan lembaga ini sudah diaudit oleh auditor Independent dan Dana bersumber dari Pusat ataupun Donatur donatur yang berkualitas.

Kelebihan LAZIS UMS ada pada pembagian divisi pada struktur organisasi yang jelas dan tegas, distribusi dana yang didominasi oleh dana produktif bukan hanya dana konsumtif, dan siklus akuntansi yang tidak rumit. Sedangkan kelemahan LAZIS UMS terletak pada belum dilakukannya audit eksternal oleh auditor Independent sehingga akuntabilitas laporan keuangannya masih dapat dipertanyakan.

Kesamaan dan perbedaan dari sistem akuntansi yang digunakan oleh LAZIS MU dan BMT GOZIS adalah sebagai berikut:

Sudah dijelaskan dalam tabel pada BAB IV bahwa sistem akuntansi yang dipakai oleh LAZIS MU adalah sistem Akuntansi Standar, sedangkan BMT GOZIS memiliki sistem akuntansi yang sama

yaitu Akuntansi standar akan tetapi pelaporannya masih dengan neraca dan buku kas. Dalam laporan keuangan kedua lembaga tersebut memiliki kesamaan yaitu menggunakan neraca, laporan sumber dan pengeluaran dana zakat, laporan arus Kas, catatan atas laporan keuangan dan dalam pengelolaan administrasi pelaporannya LAZIZMU dikelola oleh tenaga profesional sedangkan BMT GOZIS masih kurang berpengalaman sehingga di BMT GOZIS masih terkesan sederhana

#### **Saran**

1. Lembaga amil yang berfokus pada aktivitas pengembangan umat, membutuhkan tenaga akuntansi yang handal dan terampil sebagai media dalam penilaian profesionalitas dan akuntabilitas lembaga amil bukan hanya dalam pelaksanaan tugas pencatatan sehari-hari, tetapi juga dalam proses pengembangan lembaga supaya mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sembari meningkatkan perekonomian

umat melalui lembaga amil zakat seperti BMT GOZIS dan LAZIS UMS.

Oleh karena itu perlu kiranya diadakan suatu pelatihan bagi para tenaga keuangan atau akuntansi di jajaran kepengurusan lembaga amil, bahkan bukan tidak mungkin bagi lembaga amil melakukan perekrutan sumber daya baru dari luar agar tercipta berbagai inovasi dan perbaikan sistem yang telah ada sebelumnya.

2. Standar akuntansi zakat mutlak diperlukan karena standar akuntansi menjadi kunci sukses Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, lembaga ini harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.
- Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan

serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik, sehingga sebaiknya IAI sebagai lembaga akuntan Indonesia membuat suatu standar akuntansi untuk lembaga amil yang dikelola secara mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismanto, Kuat. 2009. *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2012. *FIQH Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sholahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Kamus. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariat) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan.s